



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN APLIKASI PERLINDUNGAN SAKSI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:
JANSEN HENRY KURNIAWAN
NPM. 231003742010417

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KEBIJAKAN APLIKASI PERLINDUNGAN SAKSI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
JANSEN HENRY KURNIAWAN
23100742010417

Mengesahkan Tim Penguji,
Ketua,

Dr Dwinanda Linchia Levy HNK, S.H,M.H..
NRP/NIP. 1111247

Anggota,

Anggota,

Rubiyanto, S.H, M.H
NRP/NIP.1111225

Dr. Anick Tyaswati WL, S.H, M.Hum
NRP/NIP.111161



Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, M.Hum
NRP/NIP. 1111116

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum	10
B. Tinjauan Khusus	26
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Penyajian Data.....	45
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Kebijakan Aplikasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.....	46
B. Kendala yang Dialami LPSK dalam Memberikan Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006	71
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) kebijakan aplikasi perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dan 2) kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan aplikasi perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggunakan instrumen data yaitu wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) kebijakan hukum perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, di mana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri. Perlindungan hak asasi manusia bagi saksi dan korban sangat diutamakan di sini, sehingga dengan pentingnya perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan tindak pidana korupsi dibentuklah Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban; 2) kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi selama ini ialah merasa kurang mendapatkan perlindungan hukum, dan terkadang ada saksi dalam kasus tipikor yang akhirnya dijadikan tersangka. Dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar, agar kedudukan saksi dalam tipikor bisa berjalan sebagaimana pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus lainnya yang dilindungi oleh undang-undang.

Kata Kunci: Kebijakan Aplikasi, Perlindungan Saksi, Tindak Pidana Korupsi